

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Keikutsertaan Indonesia dalam *Millennium Development Goals (MDGs)* tahun 2000 membuktikan pemerintah berkomitmen mengurangi kemiskinan di Indonesia. *MDGs* harus dicapai pada tahun 2015, membuat negara-negara anggota berusaha mempercepat pertumbuhan ekonominya termasuk Indonesia. Permasalahan mendasar seperti ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran sering terabaikan di dalam pertumbuhan yang telah dicapai. Pelajaran dari pengalaman negara-negara industri baru (NIC's) seperti Korea Selatan, Taiwan dan negara-negara industri seperti Perancis, Jerman Barat, Inggris, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonominya bersumber dari pertumbuhan masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas (Hasibuan, 1996: 8).

Berbeda dengan kondisi yang ada di negara sedang berkembang, seperti Indonesia, justru jumlah penduduk yang besar nampaknya menjadi beban pembangunan ekonomi itu sendiri. Menurut Adam Smith (Boediono, 1992: 7) pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah membuat pertumbuhan ekonomi memunculkan permasalahan mendasar seperti ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran.

Sebagai negara berkembang Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tinggi seperti terlihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Penduduk Indonesia Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008–2012

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
2008*	114.051.000 (50,07)	113.728.000 (49,93)	227.779.100
2009*	115.458.700 (50,06)	115.174.000 (49,94)	230.632.700
2010	119.852.700 (50,25)	118.666.100 (49,75)	238.518.800
2011	121.602.400 (50,25)	120.388.300 (49,75)	241.990.700
2012	123.331.000 (50,25)	122.094.200 (49,75)	245.425.200

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia *2000-2025, dan 2010-2035 (diolah).

Keterangan: angka dalam kurung menunjukkan persentase.

Tahun 2008 jumlah penduduk Indonesia mencapai 227.779.100 orang, di mana 114.051.000 laki-laki atau sebesar 50,07 persen dan 113.728.000 perempuan atau sebesar 49,93 persen. Tahun 2012 jumlah penduduk Indonesia meningkat menjadi 245.425.200 orang. Jumlah laki-laki mencapai 123.331.000 orang atau 50,25 persen dan perempuan mencapai 122.094.200 orang atau 49,75 persen. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 persen selama periode 2000-2010 dapat membuat permasalahan ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran semakin berat (Bps, 2012).

Ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan mendasar di dalam pertumbuhan ekonomi. Professor Dudley Seers (dalam Todaro,

2002: 20) menyatakan ketika pertumbuhan terjadi namun beriringan dengan meningkatnya ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran maka sebenarnya pertumbuhan tersebut tidak pernah terjadi. Pertumbuhan yang baik dapat diukur dengan berkurangnya ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran.

Pergeseran pandangan mengenai ukuran pertumbuhan suatu negara dari Produk Domestik Regional (PDB) kepada kualitas hidup yang lebih baik diakui oleh banyak pihak. Bank Dunia (dalam Todaro, 2002: 22) juga menyatakan bahwa melalui perbaikan pendidikan, kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, pemerataan kesempatan, perbaikan lingkungan hidup, peningkatan kebebasan individual, dan pelestarian ragam kehidupan budaya, juga menjadi prasyarat untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Perbaikan pendidikan dalam masyarakat akan berdampak pada berkurangnya kesenjangan pendapatan dan pengangguran di suatu daerah. Quieroz (2002: 198) menemukan bahwa pendidikan menentukan kualitas angkatan kerja, yang pada akhirnya berpengaruh pada pendapatan dan produktivitas kerja. Barros (dalam Quieroz, 2002: 198) menemukan bahwa tingkat keahlian ditunjukkan dengan tingkat pendidikan yang juga menentukan perbedaan upah regional. dan Nihayah (2010: 28) juga menemukan bahwa tenaga kerja sangat terdidik dan terampil (*high skilled labor*) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penentuan upah regional.

Tahun 2004 *United Nation Development Programme (UNDP)* melaporkan adanya kesenjangan pendidikan antar gender (*educational gender gap*) yang banyak

ditemukan di negara-negara termiskin dan secara regional terdapat di Timur Tengah serta Afrika Utara (Todaro, 2002: 449). Holsinger (dalam Carnoy, 1986: 4) juga menemukan bahwa perbaikan kualitas pendidikan perempuan juga dapat menurunkan angka kelahiran.

Menurut Haddad (1990: 10) mempersempit kesenjangan gender dalam pendidikan dengan memperluas kesempatan pendidikan bagi kaum perempuan sangat menguntungkan secara ekonomis karena: 1) Tingkat pengembalian (*rate of return*) dari pendidikan kaum perempuan lebih tinggi. 2) Meningkatkan produktivitas, meningkatkan partisipasi tenaga kerja, fertilitas yang lebih rendah, dan perbaikan kesehatan serta gizi anak. 3) Kesehatan dan gizi anak yang lebih baik serta ibu yang lebih terdidik memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) terhadap kualitas anak bangsa. 4) Perbaikan dalam pendidikan mempunyai dampak penting dalam memutuskan lingkaran setan kemiskinan karena kaum perempuan memikul beban terbesar dari kemiskinan (Todaro, 2002: 449).

Tahun 2008 Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) menyatakan dibandingkan dengan kemajuan laki-laki, status dan peran perempuan sampai saat ini masih tertinggal. Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyatakan suatu daerah atau negara yang memiliki selisih atau *gap* antara nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender) dapat diindikasikan bahwa kesenjangan gender masih terjadi. Kesenjangan gender di Indonesia masih terjadi, namun sedikit demi sedikit mulai menunjukkan adanya

perbaiki. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang menunjukkan adanya kondisi yang lebih baik, dilihat dari *gap* antara IPM dan IPG yang lebih rendah (BPS, 2011: 67).

Kesenjangan gender dalam pendidikan di DIY sangat menarik untuk diketahui. Selain dikenal sebagai kota pelajar, kota pariwisata dan kota perjuangan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga dikenal sebagai kota kebudayaan. Kebudayaan yang masih sangat kentara tentunya juga mempengaruhi kehidupan masyarakat DIY, adanya budaya patriarki dalam budaya jawa mulai ditinggalkan. Pandangan bahwa perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan tinggi mulai berkurang, seiring dengan bertambah banyaknya lembaga-lembaga pendidikan di DIY. Hal ini dapat dilihat dari nilai IPM dan IPG di atas rata-rata nasional. Selama lima tahun terakhir (2008-2012) menunjukkan bahwa kesenjangan gender yang terjadi di DIY relatif kecil bila dibandingkan kesenjangan gender di tingkat nasional.

Tabel 1.2
IPM dan IPG DIY Tahun 2008-2012

Tahun	IPM	IPG	Selisih
2008	74.88	71.50	3,38
2009	75.23	72.24	2,99
2010	75.77	72.51	3,26
2011	76.32	73.07	3,25
2012	76.75	74.11	2,64

Sumber: BPS 2014.

Berdasarkan Tabel 1.2 selisih IPM dan IPG DIY pada tahun 2008 sebesar 3.38 dan terus mengalami penurunan sehingga pada tahun 2012 selisih IPM dan IPG DIY menjadi 2.64. Rentang IPM dan IPG DIY yang semakin kecil menunjukkan

kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan lebih baik dibandingkan provinsi lainnya.

Konsep *Women And Development* oleh UNDP mengandung makna bahwa kualitas kesertaan perempuan dalam pembangunan sangat penting. Pujiati (2012) menemukan adanya kausalitas antara angkatan kerja perempuan yang bekerja di Provinsi Jawa Tengah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tabel 1.3 menunjukkan angkatan kerja menurut jenis kelamin di DIY, selama lima tahun terakhir (2008-2012) persentase angkatan kerja perempuan di DIY mengalami peningkatan, meskipun masih di bawah persentase angkatan kerja laki-laki.

Tabel 1.3
Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di DIY Tahun 2008-2012

Jenis kelamin	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Laki-laki	1.124.292 (56,22)	1.152.623 (57,15)	1.033.551 (54,91)	1.042.463 (55,66)	1.077.366 (55,40)
Perempuan	875.442 (43,78)	864.071 (42,85)	848.745 (45,09)	830.449 (44,34)	867.492 (44,60)
Jumlah	1.999.734	2.016.694	1.882.296	1.872.912	1.944.858

Sumber : BPS 2013, diolah.

Keterangan: angka dalam kurung menunjukkan persentase.

Pendapatan yang tinggi di masyarakat akan berpengaruh pada pengeluaran uang yang lebih banyak untuk pendidikan dan kesehatan, dengan kesehatan dan pendidikan yang baik, produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi akan lebih mudah dicapai (Todaro, 2002: 438). Seberapa banyak barang dan jasa yang tersedia bagi setiap orang untuk melakukan konsumsi dan investasi dapat diketahui melalui Produk Domestik Bruto per kapita (PDB per kapita). Hal ini berarti untuk mengetahui

pendapatan rata-rata penduduk DIY dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB per kapita).

PDRB sering kali tidak dapat menunjukkan kesejahteraan setiap orang, sehingga terkadang suatu daerah memiliki PRDB tinggi namun PDRB per kapitanya rendah. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan, di mana pertumbuhan ekonomi hanya berasal dari beberapa pihak dan tidak merata. Pekerja dengan modal manusia lebih banyak secara rata-rata memperoleh upah lebih tinggi daripada pekerja dengan modal manusia lebih sedikit. Pekerja lulusan universitas di AS memperoleh upah hampir dua kali lipat pekerja yang hanya lulusan sekolah menengah akhir atau SMA (Mankiw, 2004:515).

Modal manusia dapat dianggap sebagai sebuah keputusan investasi misalnya dalam memutuskan apakah melanjutkan kuliah atau bekerja setelah lulus SMA. Melalui kuliah seseorang berharap dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi di masa yang akan datang dibandingkan dengan pendapatan apabila seseorang tidak melanjutkan kuliah (Santoso, 2012: 43).

Tabel 1.4 menunjukkan perkembangan PDRB per kapita DIY dan jumlah perempuan yang menamatkan pendidikan DIPLOMA I-III dan universitas pada periode waktu 1995-2012. Seiring dengan peningkatan PDRB per kapita, setiap tahunnya jumlah perempuan yang menamatkan pendidikan DIPLOMA I-III dan universitas juga meningkat. Apabila dibandingkan, jumlah perempuan yang

menamatkan pendidikan universitas jauh lebih tinggi daripada yang menamatkan DIPLOMA I-III.

Tabel 1.4
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2000
(juta rupiah) dan Jumlah Perempuan dengan Pendidikan Akhir
DIPLOMA I-III dan universitas di DIY

Tahun	PDRB per Kapita (dalam rupiah)	DIPLOMA I-III (dalam orang)	Universitas (dalam orang)
1995	4397581	19476	15175
1996	4709251	24326	23159
1997	4819820	26498	23922
1998	4227805	28227	29307
1999	4222716	36171	31361
2000	4348744	33379	20924
2001	4459575	35125	33356
2002	4577395	35759	41399
2003	4703446	49786	52126
2004	4870324	47473	59078
2005	5024765	49141	66415
2006	5157411	47946	69887
2007	5325762	56581	70144
2008	5662383	57263	70989
2009	5855379	57969	92638
2010	6086017	59348	92714
2011	6346347	56775	97820
2012	6631806	49670	90414

Sumber: BPS dan SUSENAS DIY.

Penelitian ini ingin mengetahui adakah hubungan dua arah (kausalitas) antara tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh perempuan dengan PDRB per kapita di DIY. Apakah dengan meningkatnya pendidikan perempuan akan berdampak signifikan terhadap PDRB per kapita, dan sebaliknya meningkatnya PDRB per kapita akan berdampak signifikan terhadap pendidikan perempuan di DIY khususnya dalam tingkat perguruan tinggi baik DIPLOMA I-III ataupun universitas.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini ingin mengetahui apakah terdapat kausalitas antara tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh perempuan dengan Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB per kapita) di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tahun pengamatan 1995-2012.

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari studi ini untuk mengetahui adakah kausalitas antara tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh perempuan dengan Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB per kapita) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat dari studi ini diharapkan:

1. Sebagai pertanggung jawaban ilmiah dalam memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para penentu kebijakan pembangunan ekonomi terutama kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Sebagai sumbangan pemikiran sebagai ilmu pengetahuan terutama peminat atau pemerhati tentang studi kesetaraan gender.

1.5.Hipotesis

Dalam penelitian ini, untuk menjawab tujuan penelitian maka, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga ada kausalitas antara jumlah perempuan yang menamatkan tingkat pendidikan akhir DIPLOMA I-III dengan PDRB per kapita..
2. Diduga ada kausalitas antara jumlah perempuan yang menamatkan tingkat pendidikan akhir universitas dengan PDRB per kapita.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai konsep dan teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan teori yang akan dijelaskan mengenai pembangunan yang berfokus pada pembangunan manusia dan kesetaraan gender dalam pendidikan.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini akan memuat analisis data yang telah dilakukan dan diskusi ekonomi yang akan menjelaskan dan mengartikan analisis data secara ekonomi.

BAB V: Penutup

Bagian ini akan berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan analisis data dan pembahasan.

